

**PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL
DI KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2004-2008**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

SRI LESTARI WIJAYA
B 200 070 025

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Tentu saja makna pembangunan daerah tersebut sangat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yang ingin dicapai oleh setiap negara. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi warga negara karena tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan. Dalam literatur ekonomi makro, tingkat kesejahteraan tersebut diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Makin tinggi PDB per kapita, makin sejahtera masyarakat. Agar PDB meningkat, maka perekonomian harus bertumbuh dan harus lebih tinggi dari pada tingkat pertambahan penduduk.

Selain itu, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat berarti output yang dihasilkan juga meningkat (Hariadi, 2008: 103).

Sejak tahun 1965-1990, perekonomian Indonesia telah mengalami paling tidak 4 krisis utama. Krisis pertama tahun 1966-1970, berkenaan dengan upaya untuk mengembalikan stabilitas dan pertumbuhan. Kedua adalah krisis Pertamina yang dimulai dengan konsep "Pertamina sebagai dinamisor perekonomian" di luar badan resmi kementerian, yang pada akhirnya menghasilkan krisis pinjaman luar negeri. Krisis ketiga dikenali dengan "*Dutch Disease*" dan terakhir kejutan eksternal negatif tahun 1980-an berupa penurunan harga minyak dari US \$28/barrel menjadi US \$10/barrel (Mutmainah, 2007: 26). Saat ini, ekonomi UKM adalah salah satu bagian perekonomian Indonesia yang mempunyai peran cukup strategis dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (2004) dalam Heatubun (2007: 119) menyatakan bahwa peran strategis tersebut sudah teruji dalam masa krisis, yaitu UKM tetap kokoh dikala ekonomi Usaha Besar mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga dengan adanya UKM pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat rezim *managed floating* relatif lebih tinggi dibandingkan pada saat rezim *floating*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat rezim *managed floating* berkisar 6,5% per tahun (Susilo, Sihalo dan Tarsidin, 2008: 181). Di sebuah negara atau wilayah regional yang luas seperti Indonesia, sangat memungkinkan terjadinya variasi

pertumbuhan antar wilayah. Menurut Todaro (2003) dalam Aristanti dan Wiyono (2008: 113) ada beberapa perbedaan struktural yang menjadi faktor penentu besar-kecilnya potensi ekonomi suatu negara yakni luas wilayah secara geografis, jumlah penduduk, serta tingkat pendapatan. Selanjutnya perbedaan latar belakang sejarah, komposisi etnik dan agama, arti penting relatif sektor pemerintah dan sektor swasta, struktur industri, serta ketergantungan eksternal dari wilayah tersebut. Faktor penentu (determinan) dari negara yang sedang berkembang tersebut dapat diaplikasikan pula pada skala geografis yang lebih rendah seperti negara bagian, provinsi dan kabupaten atau kota.

Pembangunan ekonomi pada arus lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan kesejahteraan bersama (Lincoln Arsyad, 1999 dalam Aristanti dan Wiyono, 2008: 113). Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Misi utama dari kedua undang-undang dan PP yang menyertainya bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sedangkan pembiayaan pembangunan daerah tidak lepas dari pendapatan dan anggaran belanja daerah, ini diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002, Selain mengerahkan segala potensi yang ada untuk lebih mendorong pembangunan dalam rangka pengembangan

wilayah dan masyarakatnya, pembangunan ekonomi regional juga sudah mulai ditekankan pada kerjasama antar sektor dan antar daerah. Hal ini penting untuk memperkecil egoisme daerah, yang akhir-akhir ini muncul sebagai akibat dari berubahnya sistem pemerintahan otoriter Orde Baru ke sistem demokrasi di masa sesudah pemerintahan otoriter tersebut jatuh di tahun 1997.

Pembangunan ekonomi regional yang diiringi dengan pembangan kerjasama antar wilayah menjadi alternatif bagi suatu daerah yang pembangunannya sudah pesat. Selain itu, kerjasama juga diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan bagi daerah yang proses pembangunannya lebih pesat. Daerah yang pertumbuhannya lebih tinggi akan memberikan peluang atau membantu daerah tetangganya untuk mengejar ketertinggalannya dalam hal pertumbuhannya misalnya dengan kerjasama pengembangan jaringan investasi dan lain sebagainya.

Dimulainya beberapa kerjasama antar beberapa pemerintah daerah dalam lingkungan regional atau yang disebut dengan *Regional Management* ini tidak lain bertujuan untuk secara bersama mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya secara khusus dalam bidang ekonomi, dan juga bidang investasi sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata antar daerah dan juga dapat menciptakan daya saing antara daerah. Di Jawa Tengah ada kerjasama antar daerah Subosukowono-Sraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Kranganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten) dengan dasar kerjasama ekonomi regional. Sapta Mitra Pantura (Batang, Pemalang,

Pekalongan, Tegal, Brebes dan Kota Pekalongan dan Kota Tegal) dengan fokus kepentingan pengelolaan dan pemasaran potensi bersama. Barlingmascakeb (Banarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen) yang terbentuk atas dasar kesamaan budaya, serta masih banyak lagi kerja sama regional di wilayah lain di Indonesia ini yang sudah mulai dikembangkan.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satu indikator penting yang perlu dianalisis adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas ekonomi menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu dan perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditopang oleh kontribusi dari berbagai sektor ekonomi yang membentuk PDB (untuk tingkat nasional) atau PDRB (untuk tingkat daerah).salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah pengeluaran daerah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi,pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode waktu tertentu meliputi belanja daerah yang terdiri dari Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik, Untuk itu struktur ekonomi di indonesia dapat dilihat dari komposisi pendapatan dan pengeluaran daerah.

Beberapa penelitian mengatakan bahwa dampak belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di peroleh dari hasil bahwa belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Jawa Tengah, belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan Variasi pertumbuhan ekonomi yang mampu dijelaskan oleh variasi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik kecil nilainya, jumlah yang lebih besar dipengaruhi himpunan variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model ini seperti dana pihak ke tiga, kredit, suku bunga riil, teknologi, jumlah dan perkembangan penduduk, modal dan lain-lain. Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Aristanti dan Wiyono (2008) dengan penelitian tentang variasi tingkat urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja wilayah Barlingmascakeb tahun 1995-2005 diperoleh hasil bahwa tingkat urbanisasi, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi struktur ekonomi di wilayah Barlingmascakeb tahun 1995-2005.

Berdasarkan urian di atas dapat diketahui bahwa betapa pentingnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu perlu dilakukan

manajemen yang baik pada pengeluaran daerah sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh sebab itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN " 2004-2008"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mencapai pertumbuhan ekonominya adalah :

1. Apakah ada pengaruh belanja aparatur daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Boyolali tahun 2004-2008.
2. Apakah ada pengaruh belanja pelayanan publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Boyolali tahun 2004-2008.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk:

1. Mencari bukti empiris tentang pengaruh belanja aparatur daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Boyolali tahun 2004-2008.

2. Mencari bukti empiris tentang pengaruh belanja pelayanan publik terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kabupaten Boyolali tahun 2004-2008.

D. Sistematika skripsi

Untuk mengetahui gambaran tentang skripsi ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini memuat mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II memuat tentang: teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi teori pertumbuhan ekonomi, ekonomi regional, belanja daerah, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III metode penelitian ini diuraikan mengenai desain penelitian jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel pengukurannya, metode pengujian analisis regresi linier berganda.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV memuat tentang gambaran umum Dinas, pelaksanaan penelitian, diskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab V berisi kesimpulan dan saran.